



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

2020



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Januari, 2021



Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

2020

Januari, 2021

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Meski selama Tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap dapat memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya melalui PPID berbasis Android yang dapat diunduh dengan mudah di Play Store, dan informasi pada portal Open Data Jawa Tengah yang berbasis *website*. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja walaupun di masa pembatasan sosial.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik	3
BAB II Gambar Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020	8
BAB III Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2020	14
BAB IV Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2020	25
BAB V Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2020	30
BAB VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	32
Dokumentasi Kegiatan PPID	34

BAB I

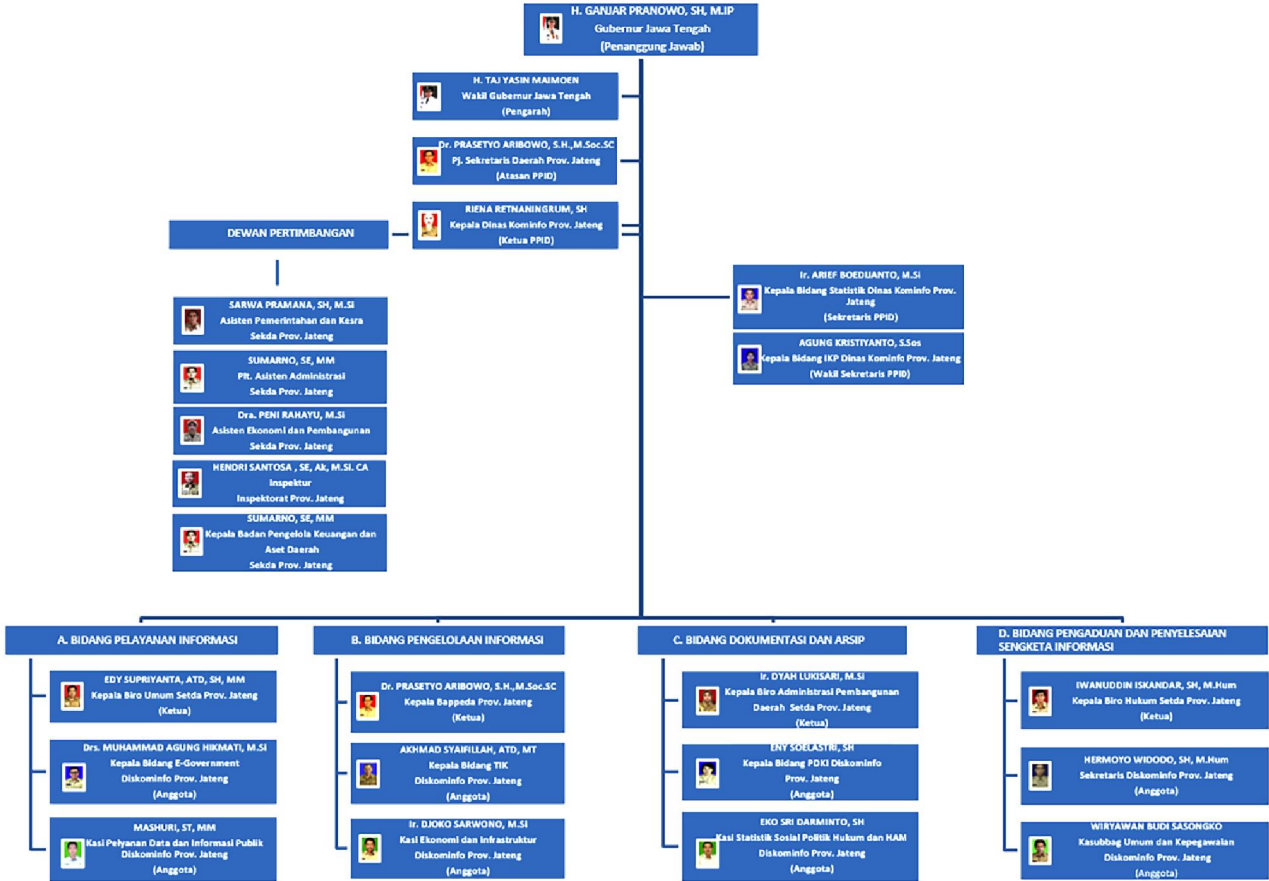
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

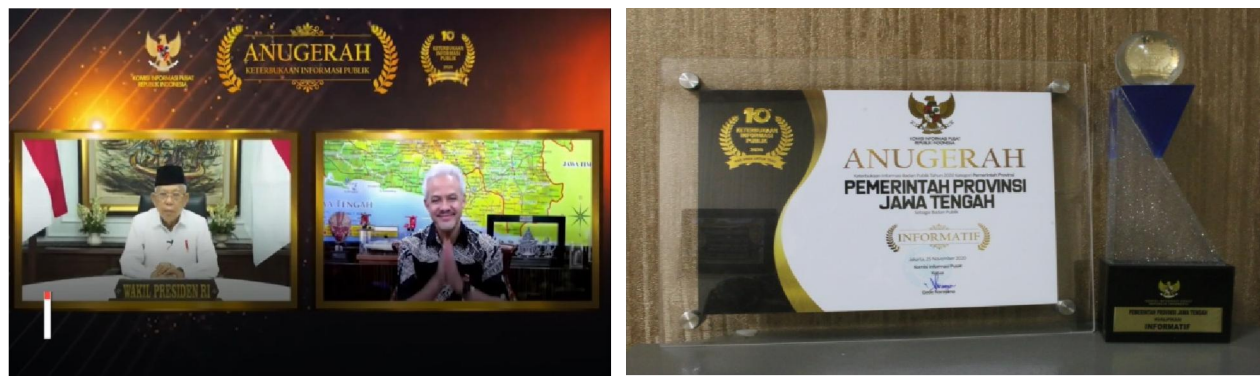
Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dan selalu mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Implementasi UU KIP tersebut diterbitkanlah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/1/2013 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi PPID Utama Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya *open government* (pemerintahan yang terbuka) di Indonesia khususnya wilayah Jawa Tengah.



Gambar 1.2 PPID Utama Prov. Jateng menerima Penghargaan Badan Publik Informatif Dalam Rangka Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 Tingkat Nasional

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat, dimana pada penilaian tersebut PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Dalam Implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan total nilai 99,15.

Tahun 2020 PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat, pada penilaian tersebut, PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Utama Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Total Nilai 99,15, dan penghargaan ini merupakan penghargaan ke-tiga kali berturut-turut.

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pembantu melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID Utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pembantu. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Utama bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Utama dan disetujui oleh Atasan PPID Utama.

Dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *good governance* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



BAB II

Gambaran Umum
Pelaksanaan Pelayanan
Informasi Publik Tahun 2020

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di Lingkungan PPID Utama akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID Pembantu SKPD dan BUMD yang ada di Jawa Tengah.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu melalui telepon, surat elektronik (email), faksimili, website <http://jatengprov.go.id> dan <http://ppid.jatengprov.go.id>, media sosial seperti Twitter, serta aplikasi *android* Jateng Slim serta kanal Open Data.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) Menugaskan staf untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi Pusat Pelayanan Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah atau ruang PPID yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Jalan Menteri Supeno 1/2, Semarang.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 07.00 wib s.d. 15.30 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, seperti email, permintaan online melalui website, aplikasi PPID berbasis android dan media sosial seperti Twitter.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Provinsi Jawa Tengah juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Provinsi Jawa Tengah (<http://ppid.jatengprov.go.id/>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP.

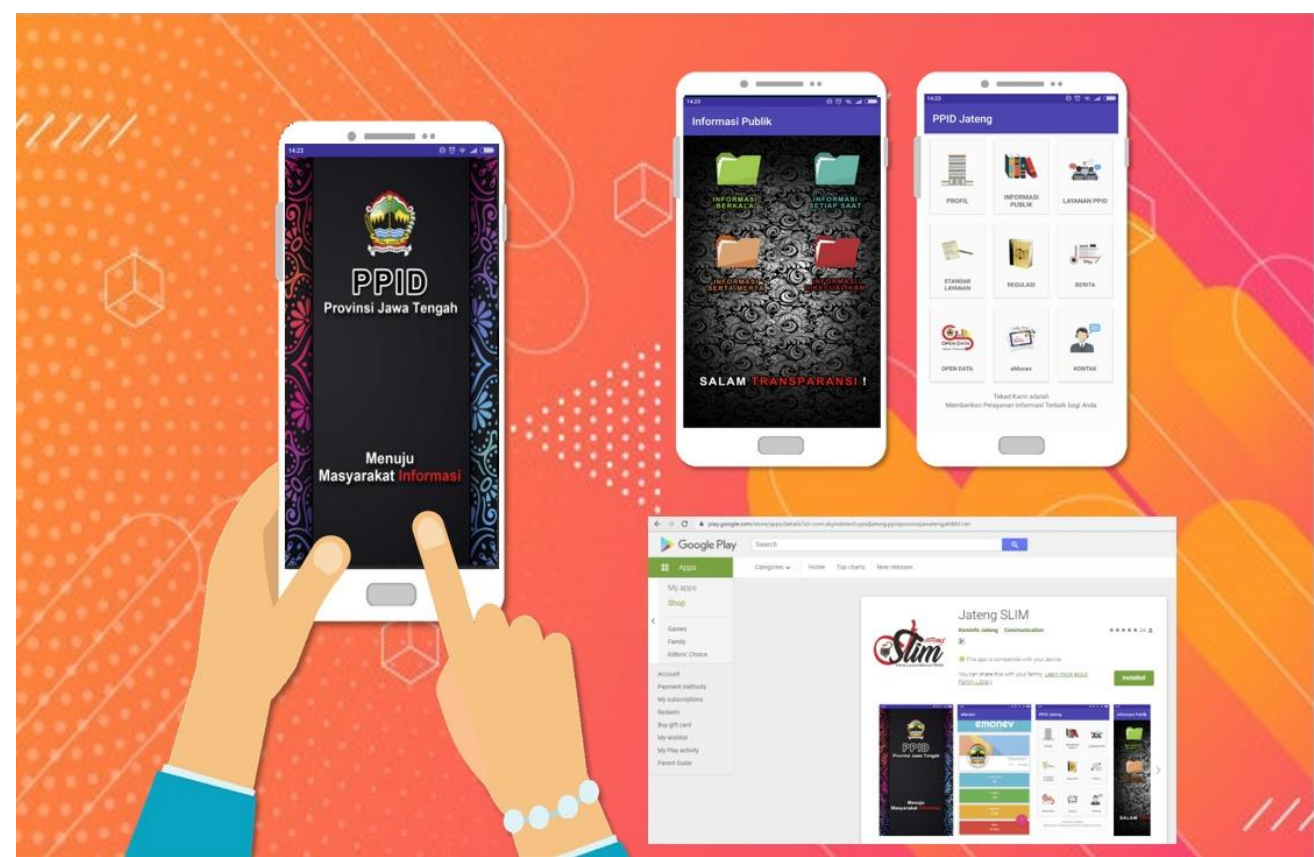
Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus kami lakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Salah satunya adalah diluncurkannya portal Open Data Jawa Tengah di alamat <http://data.jatengprov.go.id/>, dimana masing-masing SKPD berperan langsung dalam keterisian data dan informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam situs website PPID Provinsi Jawa Tengah, masyarakat dapat secara langsung melihat transparansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan

informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu pelayanan informasi publik tak hanya dilakukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah saja namun pelayanan publik lainnya dilakukan di PPID Pembantu SKPD dan BUMD.

PPID Utama Provinsi Jawa Tengah mengembangkan aplikasi PPID berbasis android dan pengenalan aplikasi tersebut diluncurkan pada pada pembukaan Pesta Rakyat yang digelar di Kabupaten Pemalang dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-68, Sabtu, 18 Agustus 2018, dan pada tahun 2019 aplikasi yang dapat diunduh melalui Google Playstore ini tetap eksis mendapatkan respon yang baik dari para tim juri penilai saat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.

Gambar 2.1 Aplikasi Android Jateng Slim Sudah Tersedia di Google Play Store



B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merujuk pada SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/1/2013 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dikelola Bidang Pelayanan Informasi, dan dibantu Staf Bidang Pengelolaan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu mengadakan sosialisasi, bintek, forum Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pembantu SKPD dan BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta PPID Utama Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020, untuk kegiatan yang meliputi : Sosialisasi keterbukaan informasi publik dalam masa pandemi Covid-19, dan Uji Konsekuensi.

Gambar 2.2 Inforgrafis Dukungan Anggaran PPID Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah





BAB III

Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020

Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Meskipun dalam masa Pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, melalui pelaksanaan kegiatan meliputi :

1. Rapat Uji Konsekuensi pada tanggal 23 Juli 2020, bertempat di Ruang Literasi Lt. 1 Diskominfo Prov. Jateng dengan peserta Jumlah peserta rapat sebanyak 20 orang yang terdiri dari perwakilan PPID Pembantu 3 SKPD serta unsur-unsur PPID Utama;
2. Webinar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Masa Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 2020 secara daring, dan diikuti oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, RSUD Kab/Kota, KPU dan Bawaslu Kab/kota, Instansi Badan Vertikal dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta PPID Pembantu SKPD maupun BUMD telah menerima 37.097 (tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh) laporan permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 5 hari kerja. Terdapat 2.203 (dua ribu dua ratus tiga) permohonan yang diarahkan kepada Badan Publik lain, karena data / informasi tersebut tidak dikuasai.

Pemohon informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk tugas kuliah, penelitian, pengawasan badan publik, perluasan cakupan pasar (penawaran produk/kerjasama), informasi pelayanan publik di SKPD dan BUMD.

Tabel 3
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID UTAMA TAHUN 2020

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	JANUARI	33	7	21	12	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
2	FEBRUARI	41	7	29	12	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
3	MARET	56	7	38	17	1	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
4	APRIL	120	7	88	32	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
5	MEI	26	7	21	5	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
6	JUNI	13	6	11	2	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
7	JULI	22	5	16	6	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
8	AGUSTUS	17	4	15	1	1	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
9	SEPTEMBER	38	3	32	6	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
10	OKTOBER	24	3	22	2	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
11	NOPEMBER	20	3	14	6	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
12	DESEMBER	34	2	21	8	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
JUMLAH		437	61	328	109	2	0	0	0	
RATA-RATA		37	5	27	9	0	0	0	0	

TABEL 4
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID PEMBANTU SKPD
TAHUN 2020

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	55	2	53	2	0	0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
2	Sekretariat DPRD Prov Jateng	10	1	10	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	4	1	4	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah	51	17	51	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5	Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah	6	3	2	4	0	0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	45	4	45	0	0	0	0	0	TERPENUHI
7	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Provinsi Jawa Tengah	1	3	1	0	2	0	0	0	TERPENUHI

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	8	1	8	0	0	0	0	0	TERPENUHI
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah	195	1	195	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	336	3	336	0	0	0	0	0	TERPENUHI
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	844	7	842	2	0	0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
12	Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	120	2	120	0	0	0	0	0	TERPENUHI
13	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	126	8	122	4	0	0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
14	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	5251	10	3091	2160	0	0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
15	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	34	5	31	3	0	0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	2	1	2	0	0	0	0	0	TERPENUHI
17	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	35	1	26	9	0	0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
18	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	286	2	283	3	0	0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	9	1	8	1	0	0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	760	7	760	0	0	0	0	0	TERPENUHI
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	954	2	954	0	0	0	0	0	TERPENUHI
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	17	9	17	0	0	0	0	0	TERPENUHI
23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah	171	6	170	1	0	0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah	86	3	83	3	0	0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	14	1	14	0	0	0	0	0	TERPENUHI
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	157	1	157	0	0	0	0	0	TERPENUHI
27	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	12	1	12	0	0	0	0	0	TERPENUHI
28	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	15	4	15	0	0	0	0	0	TERPENUHI
29	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	9	10	9	0	0	0	0	0	TERPENUHI
30	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	4	10	4	0	0	0	0	0	TERPENUHI
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	1	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
32	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	149	5	149	0	0	0	0	0	TERPENUHI
34	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah	5	5	5	0	0	0	0	0	TERPENUHI
35	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah	1176	1	1166	10	0	0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
36	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah	15	1	15	0	0	0	0	0	TERPENUHI
37	Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah	113	1	113	0	0	0	0	0	TERPENUHI
38	Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah	3	1	3	0	0	0	0	0	TERPENUHI
39	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekardjo Provinsi Jawa Tengah	2420	3	2420	0	0	0	0	0	TERPENUHI

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
40	Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah	4	0	4	0	0	0	0	0	TERPENUHI
41	Badan Penghubung Provins Jawa Tengah	15	1	15	0	0	0	0	0	TERPENUHI
JUMLAH		13518	146	11316	2202	2	0	0	0	
RATA-RATA		330	4	276	54	0	0	0	0	

TABEL 4
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID PEMBANTU BUMD
TAHUN 2020

NO	BUMD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	PT. Sarana Pembangunan Jateng	1	8	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2	PT. JAMKRIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	PT. Bank Jateng	23566	1	23566	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4	PT. Sarana Patra Hulu Cepu	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5	PT. Asuransi Bangun Askrida	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6	PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR BKK	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7	PT. Trans Marga Jateng	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8	PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9	PT. PRPP Jateng	9	7	9	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	PT. Sarana Patra Jateng	0	0	0	0	0	0	0	0	-
11	PD. Air Bersih Jateng	0	0	0	0	0	0	0	0	-
12	PD. Citra Mandiri Jateng	2	6	2	0	0	0	0	0	TERPENUHI
JUMLAH		23579	23	23578	1	0	0	0	0	
RATA-RATA		1965	2	1965	0	0	0	0	0	

Sumber Data : PPID Pembantu SKPD dan BUMD Prov. Jateng 2020

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Utama Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 5 hari kerja dalam melakukan pelayanan.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan

Pada Tahun 2020, PPID Utama Provinsi Jawa Tengah mengabulkan 34.894 (tiga puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh empat) pemohon informasi atau 94% dari 37.097 (tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh) permintaan informasi publik yang telah diterima PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah, sedangkan permohonan informasi yang diterima melalui PPID Utama Provinsi Jawa Tengah sebanyak 328 (tiga ratus dua puluh delapan) pemohon informasi yang telah dikabulkan.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Pada Tahun 2020, terdapat 2.203 (dua ribu dua ratus tiga) permintaan informasi publik (6%) yang diarahkan atau ditolak karena data/informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan yang melalui PPID Utama Provinsi Jawa Tengah sebanyak 109 (seratus sembilan) permohonan informasi diarahkan atau ditolak karena data/informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang tidak dikuasai.



BAB IV

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2020

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2020

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Sepanjang Tahun 2020, PPID Utama Provinsi Jawa Tengah mendapat 2 (dua) keberatan informasi yang diterima, yakni dari Pattiro Semarang.

Tabel 5
REKAPITULASI JUMLAH KEBERATAN INFORMASI TAHUN 2012-2020

NO	TAHUN	JUMLAH KEBERATAN INFORMASI	KETERANGAN
1	2012		Permohonan Informasi telah diteruskan ke SKPD dan Dijawab Langsung oleh SKPD terkait
2	2013		
3	2014	1 (dari Mata Umat)	
4	2015		
5	2016	1 (dari PKN)	
6	2017		
7	2018	2 (dari Independent, SH, MH & Partners Advokat Konsultan Hukum; LBH Semarang)	
8	2019	4 (dari Sdr. Sarif Hidayat; Pattiro Semarang 2; Sdr. Jusri Sihombing)	
9	2020	2 (Pattiro Semarang)	
JUMLAH		10	

B. Tanggapan Atas Keberatan

Sepanjang Tahun 2020, PPID Utama Provinsi Jawa Tengah telah memberikan 2 (dua) tanggapan atas keberatan informasi yaitu :

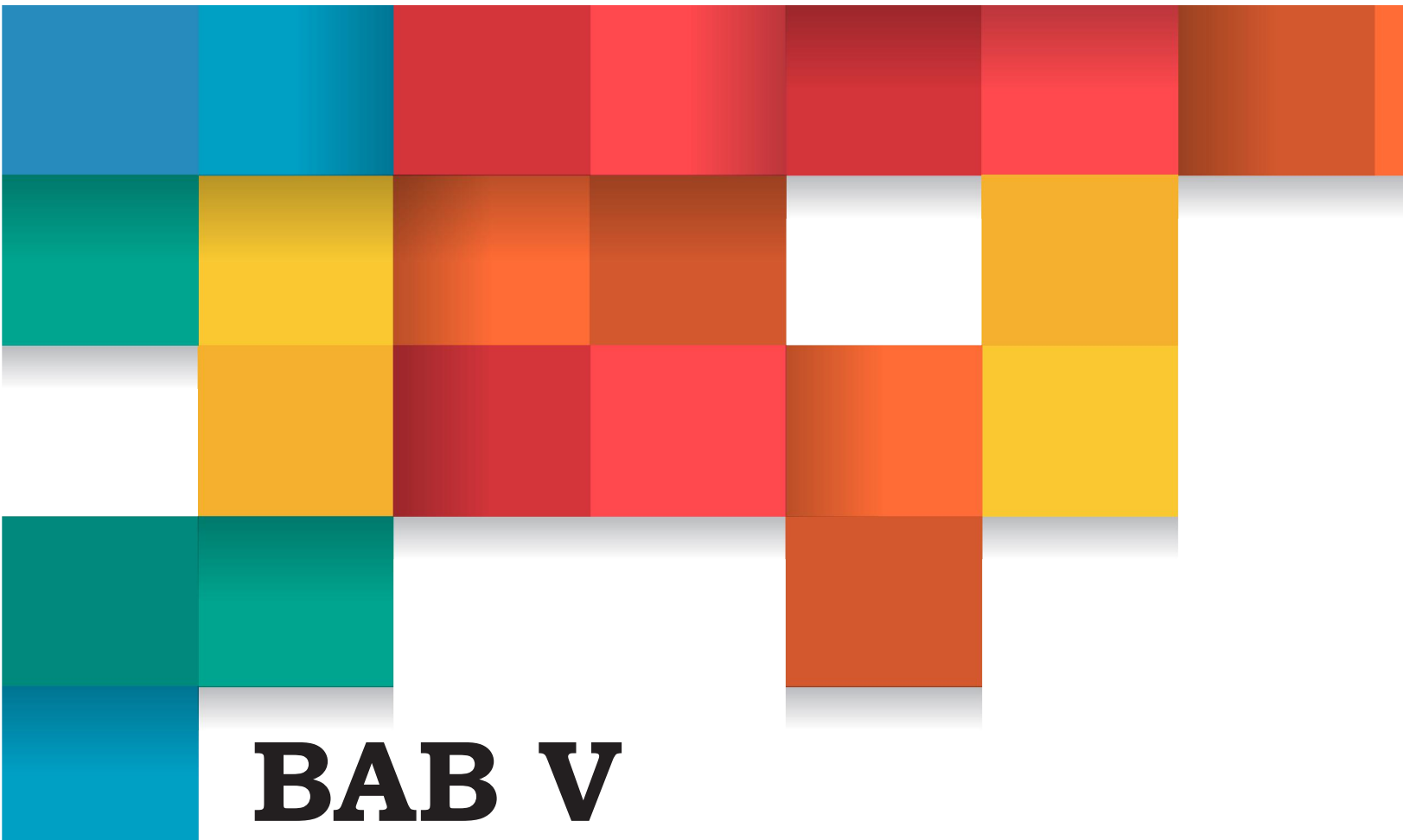
1. Tanggapan Keberatan dari Divisi Advokasi Lembaga Perhimpunan Pattiro Semarang Badan Pekerja pada Maret 2020 atas dokumen Kontrak Pekerjaan Penyediaan Konsumsi Pengelolaan SMK Boarding di Semarang, Pati dan Purbalingga Periode Januari sampai dengan Februari dan Maret sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2018 dan 2019. Informasi yang dimohonkan dipenuhi oleh PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Tanggapan Keberatan dari PATTIRO Semarang pada Agustus 2020 atas Penjabaran atas Pergub No. 10 Th. 2020 Tentang Perubahan Atas Pergub Jateng No. 44 Th. 2019 Tentang Penjabaran APBD Th. 2020. Informasi yang dimohonkan dipenuhi oleh PPID Pembantu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Sepanjang Tahun 2020, pada PPID Utama Provinsi Jawa Tengah **tidak terdapat** permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Selama Tahun 2020, PPID Utama Provinsi Jawa Tengah menolak dan mengarahkan 109 permohonan informasi publik karena bukan kewenangan dari PPID Utama Provinsi Jawa Tengah maupun PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah, namun merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, BUMN, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.



BAB V

Kendala Eksternal dan Internal
Dalam Pelaksanaan Layanan
Informasi Publik Tahun 2020

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2020

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Utama Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah, ditambah lagi kondisi Pandemi Covid-19 yang mengurangi kegiatan Sosialisasi maupun Bintek bagi PPID;
2. Pemanfaatan portal Open Data yang kurang maksimal, dan belum semua aplikasi milik SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah terintegrasikan dengan Open Data;
3. Peran PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah masih kurang aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di website ppid.jatengprov.go.id, serta aplikasi Jateng Slim dan media sosial;
4. Belum semua pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Utama, PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah memiliki sertifikat ke-PPID-an dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bahkan pada tahun 2021, beberapa pengelola PPID yang sudah memiliki sertifikat sudah habis masa berlakunya;
5. Respon PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjawab setiap permohonan informasi publik masih kurang responsif dan cepat.



BAB VI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah :

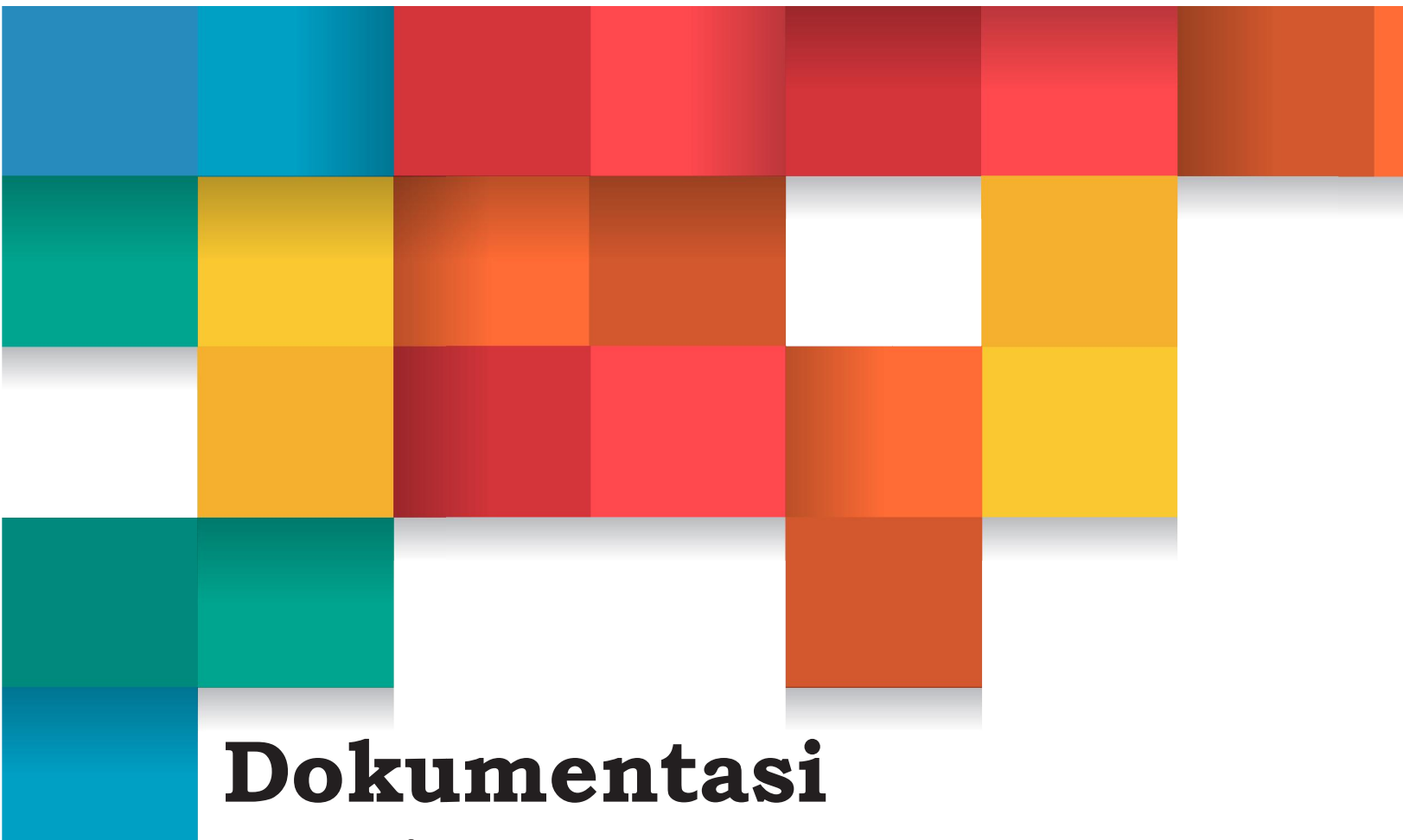
1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah pada kegiatan sosialisasi, bintek, rapat, dan uji konsekuensi yang diselenggarakan PPID Utama, baik secara daring atau luring / langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan;
2. Pengoptimalan database yang terpusat dan memanfaatkan portal Open Data dan *Single Data System* sebagai alternatif database data sektoral pada masing-masing PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah;
3. Mengajak PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah untuk selalu aktif dalam mengupdate informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi;
4. Mengikutsertakan para pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Utama, PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah pada sertifikasi ke-PPID-an yang diselenggarakan secara berkala oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Utama Provinsi Jawa Tengah.

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Selaku
ATASAN PPID UTAMA



Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H, M.Soc.Sc



Dokumentasi Kegiatan

Kelembagaan PPID

DOKUMENTASI
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Semarang, 23 Juli 2020







DOKUMENTASI
Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam
Masa Pandemi Covid-19
Semarang, 23 Juli 2020



ARTI PENTING HAK ATAS INFORMASI PUBLIK - Adobe Acrobat Reader DC

File Edit View Window Help

Home Tools ARTI PENTING HAK...

Sakpole (Bapenda)

Tanggap Covid-19 (GRMS)

Open Data (Kominfo)

OSS

Online Single Submission (DPMPSTP)

RSMS Online (RS Margono)

1

“ Memaksimalkan Pelayanan Informasi Berbasis Online (Daring) “

zoom



Secure | https://www.youtube.com/watch?v=f9Y5gOp_Xa4

Go

YouTube

Telusuri

Top chat replay

Badan Penghubung Jawa Tengah Hadir

SEMBUYIKAN REKAMAN CHAT

Sosialisasi Money Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Dalam Masa Pemic Corona19 Sesi 1

376 x ditonton • Ditayangkan live tanggal 29 Jul 2020

13 0 BAGIKAN SIMPAN